



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 dapat diselesaikan.

LKjIP ini mempunyai makna yang sangat penting sebagai suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah. Selain itu LKjIP merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan mandate untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Magelang termasuk peran Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsuhnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 26 Februari 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2017. Pada tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang telah menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari 29 (sembilan) sasaran strategis dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran, yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) bagian yang ada di Setda. Dari 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran tersebut, 8 (delapan) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun kedepan.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 telah mencapai 97,76% (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target tahun 2019 pada akhir periode Renstra dengan capaian 97,76% (*Sangat Tinggi*), maka capaian tahun 2017 tidak terlalu jauh dari capaian tahun 2019. pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung 30 program dengan jumlah anggaran Rp. 23.461.269.800,00 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 21.553.141.650,00 (91,87%), prosentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori *Sangat baik*,

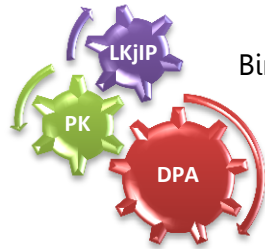
Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 8,30%, tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Aspek Strategi Organisasi	2
E. Permasalahan Utama Organisasi	28
F. Sistematika	9
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja Organisasi	19
B. Eavlusi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017	27
BAB IV : PENUTUP	64
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun 2017 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Aspek Strategis Organisasi
1. Visi dan Misi
2. Letak Geografi
3. Pembagian Wilayah Organisasi
4. Organisasi Perangkat Daerah
E. Permasalahan Utama Organisasi
F. Sistematika

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magelang tahun 2005–2025 dengan Visi RPJP Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “**Gemah Ripah Iman Cemerlang**” disingkat “**Gemilang**”.

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2014 - 2019 adalah: **Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)**. Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Titik berat pada Sekretariat Daerah adalah menjalankan visi AMANAH dalam visi Bupati Magelang, konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

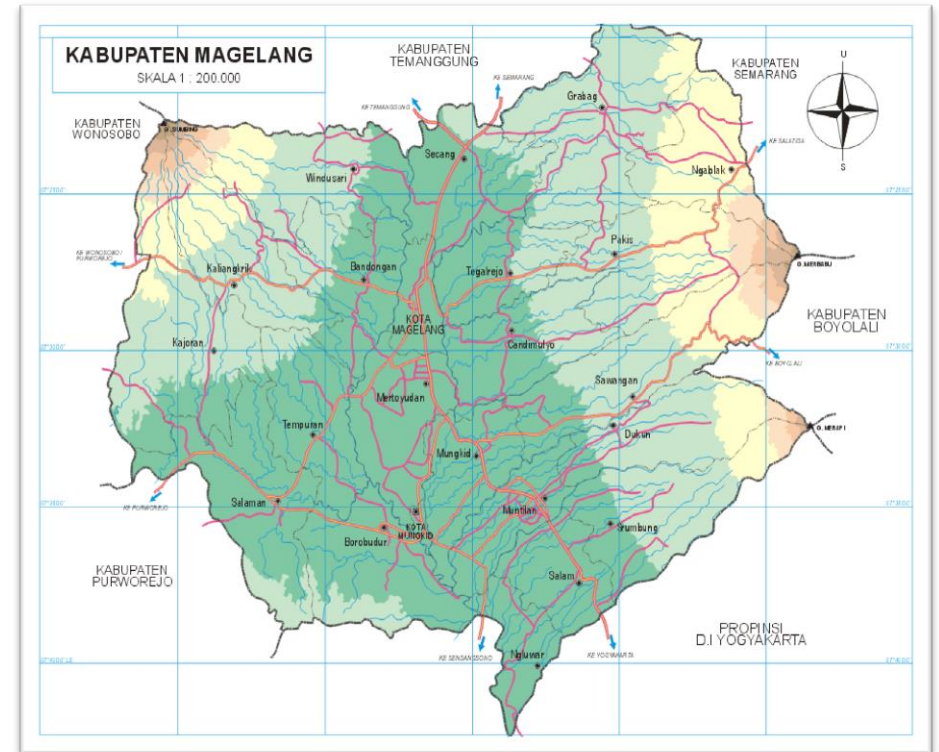
Terdapat 7 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Sekretariat Daerah menjalankan misi Bupati Magelang yang ke 5, yaitu “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah”. Dengan kata

lain Sekretariat Daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

2. Letak Geografis

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara $110^{\circ} - 01' - 51''$ Bujur Timur, $110^{\circ} - 26' - 58''$ Bujur Timur, $7^{\circ} - 19' - 13''$ Lintang Selatan dan $7^{\circ} - 42' - 16''$ Lintang Selatan.

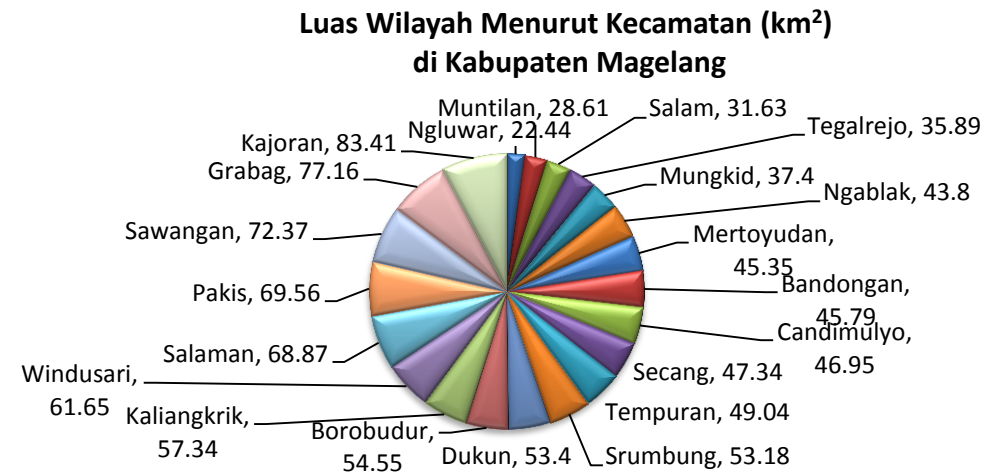
Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.



Peta Kabupaten Magelang

3. Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km² (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :



4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi Sekretariat daerah adalah :

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

a) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;

- b) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d) Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
- e) Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- g) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
- h) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - Subbagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
 - Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 - Subbagian Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.
 - b) Bagian Hukum, membawahi:
 - Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - Subbagian Kajian, Evaluasi dan Informasi Hukum; dan
 - Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian, membawahi:
 - Subbagian Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Subbagian Sarana Perekonomian; dan

- Subbagian Bina Produksi Daerah.
- b) Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - Subbagian Administrasi Perencanaan Program;
 - Subbagian Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan.
- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - Subbagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;
 - Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a) Bagian Organisasi, membawahi:
 - Subbagian Kelembagaan;
 - Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - Subbagian Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur.
 - b) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - Subbagian Peliputan, Editorial, dan Publikasi;
 - Subbagian Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi; dan
 - Subbagian Protokol.
 - c) Bagian Umum, membawahi:
 - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
 - Subbagian Keuangan.

Struktur organisasi secara lengkap terlampir

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2017 sebanyak 141 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017

No	Unit Kerja	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretaris Daerah	0	0	0
2	Asisten	3	1	4
3	Staf Ahli	2	1	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	9	2	11
5	Bagian Hukum	5	6	11
6	Bagian Perekonomian	7	4	11
7	Bagian Administrasi Pembangunan	14	3	17
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	2	11
9	Bagian Organisasi	5	3	8
10	Bagian Humas dan Protokol	9	8	17
11	Bagian Umum	26	22	48
Jumlah :		89	52	141

Sumber : Aplikasi Semar BKPPD Kabupaten Magelang, Januari 2018

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya sehingga mampu bersikap dan bertindak responsif terhadap seluruh kebijakan dari pemerintah pusat yang membutuhkan tindak lanjut peraturan di daerah.

2. Tindaklanjut peraturan teknis atas peraturan perundang-undangan yang baru masih sering terlambat yang mengakibatkan terlambatnya pengaturan di daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum sempurna, sehingga masih ditemukan tugas dan fungsi SKPD yang tumpang tindih yang berdampak pada kesalahan pola koordinasi, tugas dan fungsi yang terlewatkan, serta ditemukannya beban kerja yang berlebih.
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2017.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi dan Realisasi Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

PERENCANAAN KINERJA
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang 7 berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2017
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	33,76 %
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%
		Aplikasi PATEN	100%
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	10
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		keuangan desa	
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	B
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	100%
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%
13.	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%
14.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%
15.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%
16.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website
17.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,5 %
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	182 LKM
18.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	12%
19.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%
20.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
21.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%
22.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%
25.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%
26.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%
27.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	19 Jam/ Hari
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	155 peserta
28.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%
29.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumah tangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur	100%
		Opini BPK "WTP"	WTP
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2017.

Pada penetapan Kinerja tahun 2017 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan 29 (dua puluh Sembilan) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 38 indikator, dimanana terdapat 7 indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah, 6 Indikator merupakan IKU Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD dan 1 indikator merupakan IKU yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD. Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2017
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21,000,000
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165,000,000
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	38,065,000
4	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2,812,510,000
5	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	21,000,000
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23,000,000
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	24,000,000
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	24,000,000
9	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30,000,000
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	35,000,000
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	137,907,000
12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	669,756,000
13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	302,498,000
14	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	984,854,000
15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	120,219,100
16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	185,964,000
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,639,258,000
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,173,713,000

No	Program	Anggaran
19	Program peningkatan disiplin aparatur	86,850,000
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,500,000
21	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	626,146,600
22	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	258,890,000
24	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,782,015,500
25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000
26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,569,969,000
27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000
28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	123,653,000
29	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	780,000,000
30	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8,000,000
31	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	271,844,600
32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	25,000,000
JUMLAH :		23,461,269,800

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2017.

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2017 pada Sekretariat Daerah sebanyak 32 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23,461,269,800,00, secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2017, dan tidak terdapat anggaran bersumber pada APBN dan BLN.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2017
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	33,76 %	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30,000,000	0.13
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%			
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%			
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	35,000,000	0.15
		Aplikasi PATEN	100%			
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000	0.34
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000	0.10
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	137,907,000	0.59
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%			
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%			
10.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%			
11.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	B	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	680,000,000	2.90
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%			
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	100%			
13.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	20,000,000	0.09

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80,000,000	0.34
14	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	Program peningkatan disiplin aparatur	86,850,000	0.37
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	148,653,000	0.63
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,500,000	0.03
15	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,569,969,000	6.69
16	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%			
17	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website			
18	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	38,065,000	0.16
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,5 %	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	185,964,000	0.79
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	109 LKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	120,219,100	0.51
19	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	12%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	530,734,600	2.26
20	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%			
21	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	100%			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
22	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,782,015,500	7.60
23	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21,000,000	0.09
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165,000,000	0.70
24	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	21,000,000	0.09
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23,000,000	0.10
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	24,000,000	0.10
				Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	24,000,000	0.10
25.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2,812,510,000	11.99
26.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000	6.02
27.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	19 Jam/ Hari	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	669,756,000	2.85
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	155 peserta	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	302,498,000	1.29
28.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	984,854,000	4.20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
	dalam pembangunan					
29.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumah tangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,639,258,000	28.30
		Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur	100%			
		Opini BPK "WTP"	WTP	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	626,146,600	2.67
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8,000,000.00	0.03
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,173,713,000	17.79
Jumlah :					23,461,269,800	100

Sumber : Bagian Organisasi Sekretaris Daerah tahun 2018 diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis untuk mencapai target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2017. Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- *Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:*

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja Organisasi.
- B. Analisis dan Evaluasi Kinerja 2017

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

➤ Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja			
No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian.

2. Capaian Kinerja Sasaran

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017 dan target kinerja hingga akhir periode Renstra Sekretariat Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	10.60%	1,70%	39,37%	231,5	1,80%	218,7	IKU Kab.
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Aplikasi PATEN	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	25	25	38	152.00	25	152.00	
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	CC	B	CC	50.00	B	50.00	IKU Setda, IKU Kab.
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	97,36	100%	97,36%	97,36	100%	97,36	
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan public	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Kab.
13.	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
14.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
15.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
16.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website	8 Website	8 Website	100.00	8 Website	100.00	
17.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%	39,8%	39,8%	100.00	39,8%	100.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,5 %	0,5 %	0,33 %	60.00	0,5 %	60.00	
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	109 LKM	109 LKM	182 LKM	166,9	109 LKM	166,9	IKU Setda
18.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	8,23%	12,02%	7,42%	61.73	12,02%	61.73	
19.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
20.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	8,23%	12,02%	7,42%	61.73	12,02%	61.73	IKU Kab.
21.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
22.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
25.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama,	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kebudayaan dan kesenian								
26.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
27.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televise	19 Jam/ Hari	19 Jam/ Hari	19 Jam/ Hari	100.00	19 Jam/ Hari	100.00	
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	155 peserta	155 peserta	76 peserta	49,03	155 peserta	49,03	
28.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Seda
29.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumah tangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Opini BPK "WTP"	-	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00	IKU Kab.
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis :						97,76		97,75	

Sumber : Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2018

Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Target Indikator	
			2017	2019 (RPJMD)
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	33 (86,84%)	33 (86,84%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	0 (0,00%)	0 (0,00%)
3	66 % ≤ 75%	Sedang	0 (0,00%)	0 (0,00%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	3 (7,89%)	3 (7,89%)
5	≤ 50	Sangat Rendah	2 (5,26%)	2 (5,26%)

Sumber : *Bagian Organisasi 2018, data diolah*

Tinggi dan yang terendah pada pada capaian indikator tinggi 0 (0,00%) dan indikator sedang 0 (0,00%) . Tidak ada perbedaan rekapitulasi capaian indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2017 dibandingkan dengan target tahun 2019 pada akhir periode Renstra.

3. Realisasi Keuangan Tahun 2017

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran per Program
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21,000,000	20,948,855	99.76
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165,000,000	164,674,160	99.80

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	38,065,000	32,802,690	86.18
4	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2,812,510,000	2,702,871,980	96.10
5	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	21,000,000	20,999,850	100
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23,000,000	22,999,825	99,9
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	24,000,000	23,999,700	99,9
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	24,000,000	23,997,475	99.99
9	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30,000,000	25,132,300	83.77
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	137,907,000	131,918,075	95.66
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	35,000,000	33,999,375	97.14
12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	669,756,000	239,755,575	35.80
13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	302,498,000	300,800,585	99.44
14	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	984,854,000	907,246,950	92.12
15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	120,219,100	101,897,921	84.76
16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	185,964,000	169,895,719	91.36
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,639,258,000	6,245,289,311	94.07
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,173,713,000	3,953,095,766	94.71
19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000	1,375,860,618	97.48
20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,782,015,500	1,666,597,136	93.52
21	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000	67,978,759	85.20
22	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,569,969,000	1,353,486,588	86.21
23	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000	14,471,446	64.54
24	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	626,146,600	585,029,111	93.43

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	530,734,600	499,102,415	94.04
26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	148,653,000	96,873,175	65.17
27	Program peningkatan disiplin aparatur	86,850,000	84,418,900	97.20
28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,500,000	0	0
29	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	780,000,000	682,719,640	87.53
30	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8,000,000	4,277,750	53.47
Jumlah :		23,461,269,800	21,553,141,650	91.87

Sumber : SIMDA Kabupaten Magelang 2018

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung 30 program dengan jumlah anggaran Rp. 23.461.269.800,00 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 21.553.141.650,00 (91,87%), prosentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori **Sangat baik**, tetapi masih terdapat 2 (dua) program dengan capaian kurang dari 75%, yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa dengan realisasi anggaran 35.80% (Katagori sangat rendah) dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi anggaran 0% (Katagori sangat rendah).

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2017 terhadap 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis dan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh ke delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Tahun 2017 yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2014-2019. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun IV dari Renstra Sekretariat Daerah 2014-2019.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis., dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis meningkatnya sistem pendaftaran tanah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	10.60%	1,70%	39,37%	231,5	1,80%	218,7	IKU Kab.
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			10.60%	1,70%	39,37%	231,5	1,80%	218,7	IKU Kab.

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya sistem pendaftaran tanah telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 231,5% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 218,7 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Partisipasi dan kesadaran masyarakat masyarakat yang meningkat terhadap pendaftaran dan pensertifikatan tanah, ditunjang dengan adanya program pemerintah untuk melaksanakan sertifikat tanah masal.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp. 30,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 25,132,300 (83.77%), program ini untuk menunjang pencapaian sasaran strategis : meningkatnya sistem pendaftaran tanah, meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan dan menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan.

2. Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi tertib administrasi telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Partisipasi dan kesadaran masyarakat masyarakat yang meningkat terhadap pendaftaran dan pensertifikatan tanah, ditunjang dengan adanya program pemerintah untuk melaksanakan sertifikat tanah masal.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp. 30,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 25,132,300 (83.77%), program ini untuk menunjang pencapaian sasaran strategis : meningkatnya sistem pendaftaran tanah, meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan dan menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan.

3. Sasaran strategis menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis strategis menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Partisipasi dan kesadaran masyarakat masyarakat yang meningkat terhadap pendaftaran dan pensertifikatan tanah, ditunjang dengan adanya program pemerintah untuk melaksanakan sertifikat tanah masal, hal ini dapat meminimalisasi terjadinya konflik pertanahan.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp. 30,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 25,132,300 (83.77%), program ini untuk menunjang pencapaian sasaran strategis : meningkatnya sistem pendaftaran tanah, meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan dan menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan.

4. Sasaran Strategis meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Aplikasi PATEN	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Adanya aplikasi PATEN meningkatkan mutu layanan kecamatan kepada masyarakat sehingga meningkatkan cakupan pelayanan kedinasan dapat tercapai.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp. 35,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 33,999,375 (97,14%).

5. Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	25	25	38	152.00	25	152.00	25
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			25	25	38	152.00	25	152.00	25

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis Strategis meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Adanya iktikad yang baik dari lembaga yang terkait kerjasama memperlancar proses pelaksanaan kesjasama dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga capaian kerjasama dapat melampau target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

- 1) Rendahnya pemahaman SKPD akan pentingnya kerjasama antar daerah.
- 2) Kesepakatan bersama yang tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama sehingga kesepakatan bersama tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kerjasama antar daerah.
- 3) Kurangnya peran aktif para pihak yang bekerjasama untuk memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan.

Alternatif solusinya adalah mendorong SKPD terkait pelaksanaan teknis perjanjian kerjasama agar kesepakatan bersama segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama serta adanya komitmen bersama untuk memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp. 79,790,000 dengan realisasi anggaran RP. 67,978,759 (85,20%).

6. Sasaran Strategis meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : kesepahamam dalam menyelesaikan batas wilayah antar pemerintah daerah memperlancar proses penentuan tapal batas dan adanya fasilitasi dari pihak terkait termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan permasalahan penegasan batas dengan Kota Magelang pada sisi selatan yang berbatasan dengan Desa Mertoyudan, Desa Banyurojo dan Desa Bulurejo di Kecamatan Mertoyudan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak adanya kesepakatan atas penggunaan dokumen sebagai dasar penegasan.
Pemerintah Kabupaten Magelang berpedoman pada dokumen peta desa lama (*menut-plan*) yang dimiliki oleh masing-masing desa. Sedangkan Pemerintah Kota Magelang menyusun peta baru berdasarkan kondisi saat ini (*existing*) tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang digunakan sebagai dasar penegasan batas.
- b. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyampaikan kronologis permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang ke Gubernur Jawa Tengah. Sehingga saat ini permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang pada tataran mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Alternatif solusinya adalah tetap melaksanakan koordinasi vertikal, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp. 22,422,000 dengan realisasi anggaran RP. 585,029,111 (93,43%).

7. Sasaran Strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Adanya kucuran dana dari pemerintah Pusat maupu daerah yang cukup memadai, didukung meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Alternatif solusinya adalah dengan menyesuaikan dengan regulasi yang baru.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis yaitu program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa sebesar Rp. 137,907,000 dengan realisasi anggaran RP. 131,918,075 (95,66%). Program ini menunjang 3 sasaran strategis terdiri dari : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa.

8. Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Adanya petugas pendamping pengelolaan keuangan desa

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Keterlambatan pencairan dana desa yang disebabkan terlambatnya pengiriman syarat pencairan
2. Terdapat banyak kekurangan data, seperti pergantian masa jabatan, pengiriman berkas terlambat

Alternatif solusinya adalah dengan pemberian fasilitasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan desa.

9. Sasaran Strategis meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan :

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah : Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Desa, sehingga diklat yang diberikan kurang berdaya ungkit;

Alternatif solusinya adalah dengan pendampingan langsung kepada desa

10. Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	CC	B	CC	50.00	B	50.00	IKU Setda, IKU Kab.
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			CC	B	CC	50.00	B	50.00	IKU Setda, IKU Kab.

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah belum mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 50% (Sangat rendah) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 50% (Sangat rendah).

Permasalahan : Secara umum, Pemerintah Kabupaten Magelang belum secara intensif melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai komponen penilaian AKIP, masih mengandung banyak kelemahan, antara lain :

1. RPJMD dan Renstra pada masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indicator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target;
2. Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra belum dilengkapi dengan indicator sebagai ukuran keberhasilan;
3. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar benar akan menghasilkan outcome yang terukur;
4. Sistem Monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi, dan target-target yang ingin dicapai;
5. Sistem Evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program;
6. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Alternatif solusinya adalah :

1. Melakukan revisi/perubahan pada dokumen Renstra.
2. Reviu mencakup reviu tujuan dan sasaran, dengan dilengkapi IKU yang relevan, spesifik, dan terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing satuan kerja.
3. Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dengan mewajibkan SKPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan PK sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya.
4. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sanksi;
5. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar Rp. 680,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 682,719,640 (87,53%). Program ini menunjang capaian 2 sasaran strategis, yaitu : meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah dan meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah.

Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 58,82 dengan katagori CC, dibandingkan dengan tahun 2016 dengan nilai 58,17 dengan katagori CC mengalami peningkatan sebesar 0,65 point, tetapi tidak mengalami peningkatan katagori, target nilai AKIP pada RPJMD adalah diatas 60 dengan katagori B. Pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.5
Penghitungan Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2017.

No.	Nilai SAKIP	Bobot Nilai
1	AA	6
2	A	5
3	BB	4
4	B	3
5	CC	2
6	C	1
7	D	0

Penghitungan capaian kinerja : Target B, Realisasi CC

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi} \times 100}{\text{Jumlah bobot nilai target}}$$

$$\begin{aligned}
 &= CC/B \times 100 \\
 &= (2+1+0) / (3+2+1+0) \times 100 \\
 &= 3/6 \times 100 \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

11. Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Telah dilakukan penataan terhadap OPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum dilaksanakan
2. Penyusunan dokumen Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial terkendala dengan kesibukan tim penyusun yang telah memiliki tugas utama pada masing-masing SKPD, sehingga waktu penyelesaian mengalami keterlambatan.

Alternatif solusi terhadap permasalahan di atas adalah melaksanakan upaya koordinasi intensif, baik dengan SKPD maupun dengan tim penyusun.

12. Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan public	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Kab.
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan public telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan :

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan *e-office*, yang pelaksanaannya tergantung dengan aplikasi, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, sehingga belum bisa diaplikasikan secara menyeluruh.

Alternatif solusinya adalah dengan menerapkannya pada SKPD yang telah siap (gradual/bertahap).

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rp. 20,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 16,873,500 (84,36%) dan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rp. 80,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 70,348,000 (87,94).

Survei IKM Tahun 2017 dilaksanakan pada 150 (seratus lima puluh) Unit Pelayanan Publik yang dikelompokkan dalam 6 (enam) rumpun Unit Pelayanan Publik, jumlah Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,66% (lima koma enam puluh enam persen) dari tahun sebelumnya (2016) yang berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) Unit Pelayanan Publik dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang.

Indeks Kepuasan Masyarakat secara kumulatif tahun 2017 adalah 78,32 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh dua). Hal ini menunjukkan secara umum

kualitas pelayanan Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang masuk kategori Baik (62,51 – 81,25).

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara kumulatif tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,15 (nol koma lima belas) dari Indeks Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya (2016) yang memperoleh nilai IKM sebesar 78,17 (tujuh puluh delapan koma tujuh belas).

Jumlah Unit Pelayanan yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kategori A (Sangat Baik) sebanyak 34 (tiga puluh empat) Unit Pelayanan Publik, hal ini menunjukkan jumlah Unit Pelayanan yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat kategori A (Sangat Baik) tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 30,77% (tiga puluh koma sembilan puluh dua persen) dari tahun sebelumnya yang sebanyak 26 (dua puluh enam) Unit Pelayanan Publik.

13. Sasaran Strategis meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
13.	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Koordinasi dan konsolidasi coordinator kepegawaian di tiap bagian dalam proses pengurusan berkas kepegawaian.

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait akses ke Sistem Informasi Kepegawaian (SIPGAN) dan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Aparatur (SINAR), sehingga ada sebagian pegawai yang belm menerima bukti Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

Alternatif solusinya adalah dengan mempersiapkan jauh-jauh hari terhadap kelengkapan berkas pegawai untuk mengantisipasi kgangguan akses ke aplikasi.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis terdeiri dari 3 program, yaitu : Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 86,850,000 dengan realisasi anggaran RP. 84,418,900 (97,20%), Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp148,653,000 dengan realisasi anggaran RP. 96,873,175 (65,17%) dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 7,500,000 dengan realisasi anggaran RP. 0 (0%)

14. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
14.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Pengkajian hukum dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan kebutuhan produk hukum dan perkembangan peraturan yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah, sering tidak ada tindak lanjut dari SKPD terkait hasil kajian dan evaluasi;
2. Penggandaan Peraturan Daerah menunggu Penetapan dari Bupati;
3. Belum adanya Pengelola JDI yang bersertifikat;
4. Proses penandatanganan Peraturan BUpati dan Keputusan BUpati memakan waktu yang lama di tingkat Bupati;

5. SKPD di dalam mengirim draft ke Bagian Hukum waktunya terlalu mendekati jadwal pembahasan di DPRD, sehingga pembahasan di Bagian Hukum terlalu singkat;
6. Proses evaluasi Raperda ke Kemenkeu prosesnya sangat lama.

Alternatif solusinya adalah terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait produk hukum daerah yang dikaji dan dievaluasi;
2. Melaksanakan monitoring terhadap proses
3. n upaya koordinasi dengan SKPD penggagas Rancangan Peraturanpenetapan Peraturan Daerah dari Bupati;
4. Diikutsertakannya pengelola JDI dalam diklat;
5. Memonitoring proses penandatanganan Peraturan BUpati dan Keputusan Bupati;
6. Melaksanaka Daerah sehingga pengiriman draft nya tidak mendekati jadwal pembahasan di DPRD.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pertanahan Rp. 1,569,969,000 dengan realisasi anggaran RP. 1,353,486,588 (86,21%), program ini untuk meunjang 3 sasaran stratebgis yaitu : meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum, meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum dan meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum.



Penyerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Menteri Hukum dan HAM

15. Sasaran Strategis meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
15.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Penyelesaian masalah hukum dapat terselesaikan dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah bahwa jumlah perkara yang masuk tidak bisa diprediksikan sebelumnya, belum adanya Perpres RANHAM terbaru sebagai acuan kegiatan sehingga berpengaruh terhadap sasaran kegiatan, serta keterbatasan anggaran dan SDM yang menangani perkara. **Alternatif solusi** terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah:



Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM

1. Mengikuti Bimtek Kepengacaraan untuk aparaturn PNS, khususnya PNS di Subbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;
 2. Penambahan anggaran di perubahan;
 3. Menunggu Perpres terbaru, namun kegiatan tetap dilaksanakan.
16. Sasaran Strategis meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
16.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website	8 Website	8 Website	100.00	8 Website	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			8 Website	8 Website	8 Website	100.00	8 Website	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Telah tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengelolaan JDIH

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah website JDIH sering terkena *malware* ataupun kena *hack* yang tidak bisa diperbaiki dalam 1-2 minggu sehingga menghambat penyediaan informasi produk hukum terbaru.

Alternatif solusi terkait permasalahan di atas adalah pemasangan perlindungan dari serangan *malware*.

17. Sasaran Strategis meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
17.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%	39,8%	39,8%	100.00	39,8%	100.00	
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,5 %	0,5 %	0,33 %	60.00	0,5 %	60.00	
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	109 LKM	109 LKM	182 LKM	166,9	109 LKM	166,9	IKU Setda
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						108,97		108,97	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 108,97% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 108,97% (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Dukungan dan semangat lembaga ekonomi masyarakat dalam pengembangan ekonomi mikro.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang program Raskin;
2. Keterbatasan data pendukung terkait laju inflasi;
3. Kualitas SDM pengelola LKM masih rendah;

- Penyerapan rendah karena penafsiran terhadap PMK yang masih beragam, serta adanya peraturan tentang Hibah Bansos, dimana penerima bantuan harus berbadan hukum;

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah :

- Sosialisasi intensif peraturan distribusi Raskin;
- Koordinasi dan penekanan kepada masing-masing SKPD untuk selalu memberika data-data ter update terkait inflasi di Kabupaten Magelang;
- Studi komparasi ke kabupaten/kota yang telah melaksanakan, serta melakukan pendampingan agar LKM berbadan hukum;
- Sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD agar persepsi terhadap PMK bisa seragam.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rp. 38,065,000 dengan realisasi anggaran RP. 32,802,690 (86,18%), Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 185,964,000 dengan realisasi Rp. 169,895,719 (91,36) dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp. 120,219,100 dengan realisasi Rp. 101,897,921 (84,76).

18. Sasaran Strategis meningkatnya kinerja BUMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
18.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	8,23%	12,02%	7,42%	61.73	12,02%	61.73	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			8,23%	12,02%	7,42%	61.73	12,02%	61.73	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 61,73% (Rendah) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 61,73% (Rendah).

Permasalahan yang dihadapi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan pengelolaan BUMD sampai dengan sekarang belum ada.

Alternatif solusi mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengeluarkan regulasi Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan pengelolaan BUMD.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 530,734,600 dengan realisasi anggaran RP. 499,102,415 (94,04%), program tersebut untuk menunjang 3 sasaran strategis, yaitu : meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan dan meningkatnya kualitas pelaporan, analisis pelaksanaan pembangunan dan meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan.



Bupati Magelang Menerima Piala
TOP BUMD Award

19. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
19.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Tersedianya aplikasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan kinerja

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Output/hasil laporan pelaksanaan belanja APBD yang berasal dari aplikasi belum sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan.
2. Kesiapan data detail program per paket pekerjaan untuk memperlancar proses pengadaan.
3. Aplikasi pengendali kinerja konstruksi belum sepenuhnya berjalan.

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah mengupayakan penyempurnaan aplikasi pelaporan belanja APBD dan pembuatan *data base* dan aplikasi/sistem informasi yang memantau dan mengendalikan pekerjaan konstruksi dan sosialisasi/pelatihan aplikasi.

20. Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
20.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	8,23%	12,02%	7,42%	61.73	12,02%	61.73	IKU Kab.
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			8,23%	12,02%	7,42%	61.73	12,02%	61.73	IKU Kab.

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 61,73% (Rendah) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 61,73% (Rendah).

Permasalahan yang dihadapi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan pengelolaan BUMD sampai dengan sekarang belum ada.

Alternatif solusi mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengeluarkan regulasi Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan pengelolaan BUMD.

21. Sasaran Strategis meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
21.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan :

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

1. Terkait dengan pengelolaan LPSE, aplikasi perlu di upgrade namun hal tersebut belum merupakan kewajiban.
2. Banyak penyedia jasa konstruksi yang belum paham dengan permasalahan administrasi.

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah :

1. Menunggu surat edaran kewajiban untuk melakukan upgrade aplikasi dari provinsi.
2. Mengundang narasumber untuk memberikan pembinaan terkait administrasi pengelolaan penyedia jasa konstruksi.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 1,782,015,500 dengan realisasi anggaran RP. 1,666,597,136 (93,52%), program tersebut untuk menunjang 2 sasaran strategis, yaitu : meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa dan meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat.

22. Sasaran Strategis meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
22.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Masyarakat telah memahami proses pengusulan proposal dan proses pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait lamanya proses persetujuan terhadap proposal bansos yang diajukan, sehingga

alternatif solusinya adalah dengan melakukan koordinasi intensif dan memberikan informasi sejak awal kepada pengaju proposal di dalam melengkapi berkas yang akan diajukan.

23. Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Partisipasi dan dukungan masyarakat alam pelaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan acuan bagi penerima hibah bansos yang harus memiliki badan hukum serta kesulitan di dalam menghimpun SPJ dari penerima bansos.

Alternatif solusi terkait permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan koordinasi, pendampingan, pemberian pemahaman secara intensif kepada penerima bansos, sehingga setelah menerima bantuan segera memenuhi kewajibannya dengan menyusun SPJ.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 21,000,000 dengan realisasi anggaran Rp. 20,948,855 (99,76%) dan program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Rp. 165,000,000 dengan realisasi anggaran Rp. 164,674,160 (99,80).

24. Sasaran Strategis Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Penyusunan kebijakan dapat terlaksana berkat kerjasama dengan SKPD terkait, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan keterbatasan anggaran untuk membiayai kegiatan.

Alternatif solusi terkait permasalahan tersebut adalah dengan penambahan anggaran, sehingga jangkauan kegiatan bisa semakin luas. Misal, terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender, dengan adanya penambahan anggaran, maka desa yang diberikan sosialisasi terkait dengan pencegahan KDRT akan semakin banyak. Demikian pula dengan kegiatan penguatan Kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), dengan adanya penambahan anggaran, maka jumlah kader yang diundang dalam sosialisasi akan semakin banyak, jika perlu setiap desa/kelurahan bisa dihadirkan. Dengan demikian, upaya pengurangan jumlah bayi penderita gizi buruk dan peningkatan ibu hamil memeriksakan kandungannya akan semakin efektif.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Rp. 21,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 20,999,850 (100%), Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 23,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 22,999,825 (99,9%), Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp. 24,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 23,999,700 (99,9%) dan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Rp. 24,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 23,997,475 (99,99%).

25. Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
25.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Dukungan tokoh agama dan kerjasama dengan sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan

Permasalahan : Belum semua wilayah dapat terjangkau oleh kegiatan tersebut

Solusi : Pelaksanaan kegiatan bergiliran di setiap daerah untuk peningkatan akses pembinaan dan pelayanan.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Rp. 2,812,510,000 dengan realisasi anggaran RP. 2,702,871,980 (96,10%).



Juara I Cabang Tilawah Putri Tk SD/MI dalam rangka lomba MTQ/STQ Pelajar Tk Provinsi Jateng Tahun 2017

26. Sasaran Strategis meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
26.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Pelaksanaan program dapat dilaksanakan berkat adanya koordinasi dengan sktor terkait

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan koordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara (SKPD *leading sector*).

Alternatif solusi terkait permasalahan di atas adalah pelaksanaan koordinasi sejak awal dengan SKPD untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan kesiapan upacara.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah Rp. 1,411,445,000 dengan realisasi anggaran RP. 1,375,860,618 (97,48%).

27. Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
27.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	19 Jam/ Hari	19 Jam/ Hari	19 Jam/ Hari	100,00	19 Jam/ Hari	100,00	
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	155 peserta	155 peserta	76 peserta	49,03	155 peserta	49,03	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						74,16		74,16	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 74,16% (Sedang) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 74,16% (Sedang).

Permasalahan : Jumlah peserta pelatihan bidang kominfo dan kehumasan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Solusi : Perencanaan ulang terhadap peserta sasaran pelatihan

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Rp. 669,756,000 dengan realisasi anggaran RP. 239,755,575 (35,80%) dan Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Rp. 302,498,000 dengan realisasi anggaran RP. 300,800,585 (99,44%).

28. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
28.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Seda
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Seda

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Kerjasama yang baik dengan media massa dalam penyampaian berita dan informasi

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Rp. 984,854,000 dengan realisasi anggaran RP. 907,246,950 (92,12%).

29. Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
29.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Opini BPK "WTP"	-	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00	IKU Kab.
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Dukungan dari tiap SKPD khususnya dalam mewujudkan opini BPK "WTP"

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah terbatas;
2. Pelaksanaan diklat seminar disesuaikan dengan jadwal KDH/WKDH;

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah:

1. Penambahan anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah terbatas;
2. Penggeseran antar rekening belanja.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6,639,258,000 dengan realisasi anggaran RP. 6,245,289,311 (94,07%), Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 626,146,600 dengan realisasi anggaran RP. 585,029,111 (93,43%), Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 8,000,000 dengan realisasi anggaran RP. 4,277,750 (53,47%) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 4,173,713,000 dengan realisasi anggaran RP. 3,953,095,766 (94,71%).

Opini BPK 'WTP' pada tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai WTP (100%) dimana target yang ditetapkan adalah Opini BPK 'WTP'. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target Opini BPK 'WTP', maka capaian kinerja tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Penghitungan Opini BPK 'WTP' untuk pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.6
Penghitungan Opini BPK 'WTP' Kabupaten Magelang Tahun 2017.

No.	Kategori Opini	Bobot Nilai
1	Wajar Tanpa Pengecualian	3
2	Wajar Dengan Pengecualian	2
3	Tidak Wajar	1
4	Tidak Menyatakan Pendapat	0

Penghitungan capaian kinerja : Target = WTP; Realisasi = WTP

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi}}{\text{Jumlah bobot nilai target}} \times 100 \\
 &= \frac{WTP}{WTP} \times 100 \\
 &= \frac{(3+2+1+0)}{(3+2+1+0)} \times 100 \\
 &= \frac{6}{6} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), pemeliharaan aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Tabel 3.7
Analisis efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1,	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	231,5%	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30,000,000	25,132,300	83,77	16,23%
2,	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%					
3,	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%					
4,	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	35,000,000	33,999,375	97,14	2,86%
		Aplikasi PATEN	100%					
5,	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	152.00%	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000	67,978,759	85,20	14,80%
6,	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000	585,029,111	93,43	6,57%
7,	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	137,907,000	131,918,075	95,66	4,44%
8,	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%					
9,	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
10	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	50%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan **)	680,000,000	682,719,640	87,53	0%
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%					
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	97,36%					
13	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun,	100%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	20,000,000	16,873,500	84,36	15,64%
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80,000,000	70,348,000	87,94	12,06%
14	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	Program peningkatan disiplin aparatur	86,850,000	84,418,900	97,20	2,80%
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	148,653,000	96,873,175	65,17	34,83%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur *)	7,500,000	0	0	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
15	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,569,969,000	1,353,486,588	86,21	15,79%
16	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%					
17	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	100%					
18	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	100%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	38,065,000	32,802,690	86,18	13,82%
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	60.00%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan *)	185,964,000	169,895,719	91,36	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	166,9%	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	120,219,100	101,897,921	84,76	13,24%
19	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	61.73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah **)	530,734,600	499,102,415	94,04	0%
20	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%					
21	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	61.73%					
22	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,782,015,500	1,666,597,136	93,52	6,48%
23	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21,000,000	20,948,855	99,76	0,24%
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165,000,000	164,674,160	99,80	0,2%
24	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	21,000,000	20,999,850	99,9	0,01%
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23,000,000	22,999,825	99,9	0,01%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	berencana			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	24,000,000	23,999,700	99,9	0,01%
				Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	24,000,000	23,997,475	99,99	0,01%
25	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2,812,510,000	2,702,871,980	96,10	4,9%
26	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000	1,375,860,618	97,48	2,52%
27	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	669,756,000	239,755,575	35,80	64,2%
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	49,03%	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi **)	302,498,000	300,800,585	99,44	0%
28	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	984,854,000	907,246,950	92,12	7,88%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan							
29	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumah tangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah,	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,639,258,000	6,245,289,311	94,07	5,93%
		Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur	100%					
		Opini BPK "WTP"	100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	626,146,600	585,029,111	93,43	6,57%
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8,000,000,00	4,277,750	53,47	6,53% ⁴
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,173,713,000	3,953,095,766	94,71	5,29%
Jumlah :					23,461,269,800	21,553,141,650	91,87	8,30%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tahun 2018, data diolah,

Catatan :

- *) Tidak ada efisiensi walau capaian kinerja $\geq 100\%$, karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sangat rendah.
- ***) Tidak dilakukan penghitungan efisiensi, karena capaian kinerja sasaran tidak mencapai $\geq 100\%$.

Berdasarkan tabel efisiensi diatas rata-rata efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 8,30%, tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.



BAB IV PENUTUP

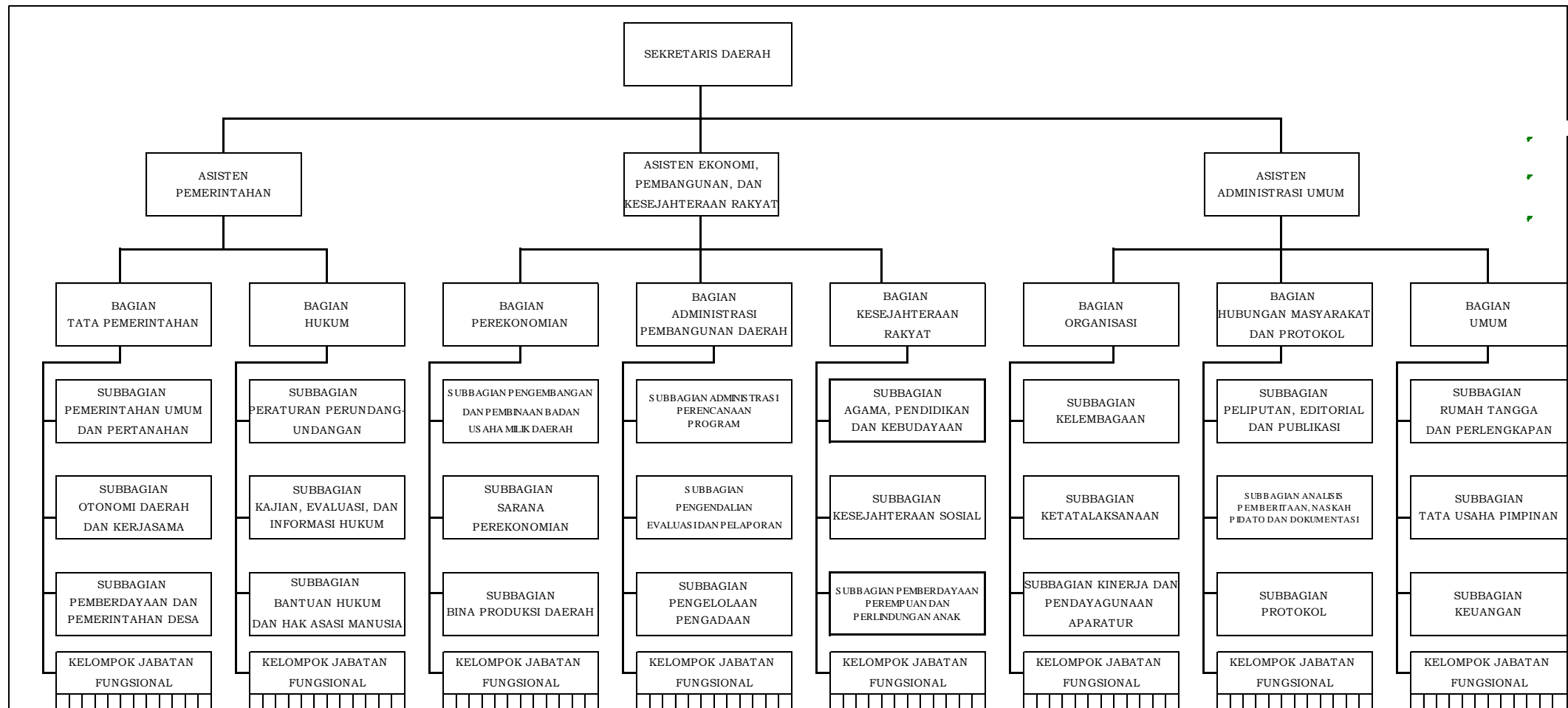
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Sekretariat Kabupaten Magelang dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikannya sumbangsuhnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 telah mencapai 97,76% (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target tahun 2019 pada akhir periode Renstra dengan capaian 97,76% (*Sangat Tinggi*), maka capaian tahun 2017 tidak terlalu jauh dari capaian tahun 2019. pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung 30 program dengan jumlah anggararan Rp. 23.461.269.800,00 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 21.553.141.650,00 (91,87%), prosentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori *Sangat baik*. Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 8,30%, tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

Harapan kami untuk tahun–tahun mendatang LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EKO TRIYONO

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : BUPATI MAGELANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, November 2017

PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.I.P

PIHAK PERTAMA

Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	33,76 %
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%
		Aplikasi PATEN	100%
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	10
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	B
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	100%
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
13.	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%
14.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%
15.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%
16.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website
17.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,5 %
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	182 LKM
18.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	12%
19.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%
20.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	100%
21.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%
22.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%
25.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%
26.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%
27.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	19 Jam/ Hari
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	155 peserta
28.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%
29.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur	100%
		Opini BPK "WTP"	WTP
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan (Suber Dana)
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21,000,000	Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2017
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165,000,000	
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	38,065,000	
4	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2,812,510,000	
5	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	21,000,000	
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23,000,000	
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	24,000,000	
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	24,000,000	
9	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30,000,000	
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	35,000,000	
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	137,907,000	
12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	669,756,000	
13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	302,498,000	
14	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	984,854,000	
15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	120,219,100	
16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	185,964,000	
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,639,258,000	
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,173,713,000	
19	Program peningkatan disiplin aparatur	86,850,000	
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,500,000	
21	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	626,146,600	
22	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000	
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	258,890,000	
24	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,782,015,500	
25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000	
26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,569,969,000	
27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000	

No	Program	Anggaran	Keterangan (Suber Dana)
28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	123,653,000	
29	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	780,000,000	
30	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8,000,000	
31	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	271,844,600	
32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	25,000,000	
JUMLAH :		23,461,269,800	

Kota Mungkid, 10 November 2017


PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.IP


PIHAK PERTAMA

Drs. EKO TRIYONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590224 198403 1 005